

**PENGARUH PARTISIPASI PUBLIK DAN AKUNTABILITAS TERHADAP
KINERJA KEUANGAN DAERAH**
(Studi Empiris Pada SKPD di Kabupaten Pesisir Selatan)

ARTIKEL ILMIAH



OLEH:

IMAM ARIF PERMANA
2009/98621

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2015**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**PENGARUH PARTISIPASI PUBLIK DAN AKUNTANBILITAS TERHADAP
KINERJA KEUANGAN DAERAH
(Studi Empiris Pada Kabupaten Pesisir Selatan)**

Oleh :

Imam Arif Permana
98621/2009

Artikel ini disusun berdasarkan skripsi untuk persyaratan wisuda periode Maret 2015 dan telah diperiksa/disetujui oleh kedua pembimbing

Padang, 23 Januari 2015

Pembimbing 1



Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak
NIP. 19730213 199903 1 003

Pembimbing 2



Charoline Cheisviyanny, SE, M.Ak
NIP. 19801019 200604 2 002

Pengaruh Partisipasi Publik dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Keuangan Daerah (Empiris pada SKPD pada Kabupaten Pesisir Selaant)

Imam Arif Permana

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus Air Tawar Padang
Email : imam.arif.permana@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan memberikan bukti empiris tentang : 1) Pengaruh Partisipasi Publik terhadap kinerja keuangan Daerah. 2) Pengaruh Akuntabilitas terhadap kinerja keuangan Daerah. Jenis penelitian ini adalah kausatif. Populasi adalah SKPD di Kabupaten Pesisir Selatan. Jenis data penelitian adalah data primer. Metode pengumpulan data menggunakan kuisioner. Teknik analisis data menggunakan regresi linear berganda.

Hasil tingkat signifikansi 5%, maka hasil penelitian ini menyimpulkan: (1) Partisipasi publik berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja keuangan daerah pada SKPD di kabupaten Pesisir selatan dengan $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $3,096 > 1,992$ dan ($sig\ 0,003 < 0,05$). (2) Akuntabilitas berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja keuangan daerah pada SKPD di kabuoapten Pesisir selatan dengan $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,179 > 1,992$ dan ($sig\ 0,032 < 0,05$).

Saran untuk penelitian ini antara lain : 1) Pemerintah harus lebih baik lagi dalam memberikan lingkup partisipasi publik sehingga menciptakan pengawasan yang baik contohnya seperti mengenai kemudahan masyarakat dalam mengakses dokumen-dokumen mengenai kebijakan anggaran. Selain itu pemerintah juga harus lebih tanggap terhadap keinginan dan kebutuhan publik guna mencapai tujuan dalam menyelenggarakan suatu pemerintahan yang baik. Pemerintah sebaiknya juga melakukan perbaikan secara terus menerus agar kinerja keuangan daerah dapat terus ditingkatkan. 2) Mengenai akuntabilitas publik memang sudah dinilai baik, namun akses yang diberikan masih sedikit lambat dalam penyampaian informasi kebijakan-kebijakan. Oleh sebab itu, sebaiknya pemerintah harus lebih akuntabel terhadap kinerjanya dalam menyelesaikan laporan keuangan. Selain itu pemerintah juga harus lebih maksimal dalam melaksanakan program-program APBD, agar manfaat dari pelaksanaan program/kegiatan yang dilakukan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Hal ini sangat penting, karena dengan begitu kita dapat melihat sejauh mana akuntabilitas pemerintah dalam melaksanakan kinerjanya. 3) Untuk penelitian selanjutnya, dapat dilakukan dengan metode lain untuk mendapatkan data yang lengkap, misalnya dengan melakukan wawancara secara langsung dengan responden dalam pengisian kuesioner sehingga jawaban responden lebih mencerminkan jawaban yang sebenarnya. 4) Peneliti yang akan melakukan penelitian selanjutnya, sebaiknya melakukan perluasan sampel penelitian atau peneliti dapat memilih SKPD yang berada diuar Kabupaten Pesisir Selatan.

Kata Kunci : Partisipasi Publik, Akuntabilitas dan Kinerja Keuangan Daerah

ABSTRACT

This study aims to test and provide empirical evidence on: 1) The effect of Public Participant on Government financial performance. 2) The effect of Accountability on Government financial performance. This study classified the causative research. The population is All SKPD in Pesisir Selatan. The data used are Primary data. Methods of data collection using questionnaires. Analysis using multiple linear regression.

Results significant level of 5%, then the results of this study concluded: (1) Public participant is significant and positive impact on government financial performance at SKPD in Pesisir Selatan district with $t > t$ table is $3,096 > 1,922$ and ($sig\ 0,003 < 0,05$). (2) Accountability is significant and positive impact on government financial performance at SKPD in Pesisir Selatan district with $t > t$ table is $2,179 > 1,922$ and ($sig\ 0,032 < 0,05$).

Suggestions for this study include: 1) The government must be better in providing a part on public participation, so as to create a good example as supervision of public convenience in accessing the documents on budget policy. Also, the government must be more responsive to the wishes and needs of the public in order to achieve the objectives in carrying out a good governance. The government should also make improvements continuously so that local financial performance can be improved. 2) Regarding public accountability is already best considered , but the access granted is still a little slow in the delivery of information public-policy. Therefore, we recommend that the government should be accountable for its performance in completing the financial statements. In addition, the government also should be maximal in implementing the programs of the budget, in order to benefit from the implementation of programs / activities that can be perceived by society. This is very important, because then we can sees extent of government accountability in implementing performance. 3) For further research, it can be done with other methods to obtain complete data, for example by conducting direct interviews with respondents in the questionnaire so that respondents better reflect the actual answer. 4) researchers who will conduct further research, preferably expanded sample or researcher can choose a others place out of Pesisir Selatan District.

Keyword : Public Participant, Accountability and Government Financial Performance

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era globalisasi saat ini merupakan sesuatu yang tidak dapat kita hindari oleh seluruh masyarakat dunia. Bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia memiliki kewajiban untuk secara terus-menerus berpartisipasi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). Pemerintahan yang baik setidaknya ditandai dengan tiga elemen yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Wujud dari salah satu perubahan ditandai dengan diluncurkannya Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, yang di dalamnya menjelaskan konsep otonomi daerah, akuntabilitas dan partisipasi publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas merupakan suatu semangat nilai dari prinsip *Good Governance* atau biasa disebut tata kelola pemerintahan yang baik. Tata pemerintahan tersebut mencakup seluruh mekanisme, proses, dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan di antara mereka. Sehingga urgensi mendasar dari prinsip *Good Governance* ini adalah agar seluruh sumber daya negara yang berada dalam pengelolaan pemerintah, dapat mencapai tujuan sebesar-besarnya demi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Partisipasi publik dapat di artikan sebagai proses tumbuhnya kesadaran terhadap hubungan di antara stakeholders yang berbeda dalam masyarakat, yaitu

antara kelompok-kelompok sosial dan komunitas dengan pengambil kebijakan dan lembaga jasa lain (Andrea Cornwall and John Gaventa).

Tuntutan utama perubahan di bidang keuangan adalah agar pengelolaan dana yang dikumpulkan dari masyarakat dilakukan secara transparan dengan mendasarkan pada konsep *value for money* agar tercipta akuntabilitas publik. Untuk mewujudkan akuntabilitas publik dalam hal keuangan daerah salah satu cara yang ditempuh adalah dengan mewajibkan pemerintah daerah untuk menyusun suatu laporan keuangan Pemerintah Daerah yang dilakukan dengan melaksanakan kegiatan akuntansi keuangan daerah. Dengan pelaksanaan tersebut maka publik dapat mengetahui kinerja keuangan dari pemerintah daerah serta akuntabilitasnya.

Dalam era otonomi daerah dan desentralisasi, pemerintah daerah diharapkan dapat menyajikan laporan keuangan yang terdiri atas Laporan Surplus/Defisit, laporan Realisasi Anggaran, laporan Aliran Kas, dan Neraca. Laporan keuangan tersebut merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas publik dan merupakan salah satu alat ukur kinerja financial pemerintah daerah.

Tuntutan dilaksanakan transparansi dan akuntabilitas publik mengharuskan Pemerintah Daerah untuk memperbaharui sistem pelaporan dan pertanggungjawaban. Pada masa sebelumnya pola pertanggungjawaban pemerintah daerah lebih bersifat *vertical reporting*, yaitu pelaporan kepada pemerintah atasan (pusat), akan tetapi dalam era otonomi ini daerah dan desentralisasi terjadi pergeseran pola pertanggungjawaban dari *vertical report* menjadi *horizontal report*, yaitu pelaporan kinerja pemerintah daerah kepada DPRD dan masyarakat luas sebagai bentuk *horizontal accountability*.

Dapat dilihat disini bahwa semakin tinggi partisipasi masyarakat maka akan semakin pula proses pengawasan yang mengindikasikan akan meningkatkan kinerja keuangan dan juga pengelolaan keuangan daerah seperti beberapa penelitian yang menyatakan partisipasi masyarakat memberikan masukan yang baik terhadap kinerja keuangan daerah. Hal ini sesuai dengan Achmadi dkk. (2002) menyebutkan bahwa partisipasi merupakan kunci sukses dari pelaksanaan otonomi daerah karena dalam partisipasi menyangkut aspek pengawasan dan aspirasi.

Sedangkan Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Stanbury, 2003). Akuntabilitas merupakan dasar dari pelaporan keuangan di pemerintahan. Akuntabilitas adalah tujuan tertinggi dari pelaporan keuangan pemerintah. Akuntabilitas meliputi informasi keuangan kepada masyarakat dan pemakai lainnya sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas seluruh aktifitas yang dilakukan.

Menurut Aheruddin (2008), dengan diterapkannya akuntabilitas, maka akan menghasilkan pengelolaan keuangan daerah (yang tertuang dalam APBD) yang benar-benar mencerminkan kepentingan dan pengharapan masyarakat daerah setempat secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.

Sehingga saat Akuntabilitas semakin tinggi dan semakin baik di suatu entitas organisasi pemerintah makanya kepercayaan dan keterandalan hasil kinerja keuangan daerah akan semakin baik, karena akuntabilitas meningkatkan dapat

memberikan arti perangkat daerah yang melaksanakan kinerja keuangan daerah dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan yang dilakukannya dan hasil kinerja dapat dipertanggungjawabkan ke masyarakat dan seluruh aktifitas perangkat yang memperlihatkan akuntabilitas yang baik akan menghasilkan kinerja keuangan daerah yang baik juga hal ini selaras dengan penelitian Silvia karsa (2010), yang menyatakan akuntansi berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Begitu pu hasil penelitian Widya (2009), yang menyatakan bahwa semakin baik akuntabilitas juga akan membuat kinerja keuangan daerah semakin berkualitas.

Dewasa ini kinerja pemerintah daerah ini menjadi sorotan masyarakat khususnya dalam mengelola dana publik. Banyak program-program pemerintah yang tidak berjalan dengan sepenuhnya, contohnya adalah Dana BOS yang dijanjikan oleh pemerintah hingga saat ini masih belum efektif dan banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan terhadap penggunaan dana BOS ini. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, telah mengatur bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta masyarakat sebesar minimal 20% dari belanja Negara. Namun, perjuangan 3 tahun para guru dalam menuntut pemerintah agar APBN memberi porsi 20% bagi pendidikan tidak dipatuhi pemerintah. Hingga pada Mei 2008, para guru berhasil menggugat APBN pemerintah periode 2009 melalui keputusan MK. Dan akhirnya pemerintah terpaksa mematuhi 20% anggaran pendidikan dari APBN.

Berdasarkan hasil audit BPK-RI dan pengolahan data di lapangan, di peroleh statistik penyelewengan dana BOS dan pendidikan dasar lainnya yaitu: sebanyak 62,85% sekolah tidak mencantumkan

penerimaan BOS dan DPL, hal ini disebabkan petunjuk teknis BOS dalam penyusunan RAPBS tidak mengatur secara jelas penyusunan dan mekanisme pengesahan dari RAPBS menjadi APBS, selain itu dikarenakan Kepala Sekolah tidak transparan dalam mengelola dana sekolah. Fakta kedua yaitu sebanyak 4,12% sekolah tidak menggratiskan biaya operasional sekolah. Fakta ketiga, dana BOS sebesar Rp28,14 miliar digunakan tidak sesuai peruntukannya (indikasi korupsi). Fakta keempat, buku dana BOS sebesar Rp562,4 juta tidak sesuai dengan buku panduan BOS (indikasi korupsi) dan senilai Rp656,7 juta belum/tidak dapat dimanfaatkan. Dan fakta yang kelima yaitu terjadinya indikasi korupsi sebesar Rp2,41 miliar dana *safeguarding* (sumber: www.google.com). Hal ini menunjukkan ketidakseriusan pemerintah dalam melaksanakan program-program yang telah dirancang.

Setyawan (2002) tentang kinerja anggaran keuangan daerah Pemerintah Kota Malang dilihat dari perspektif akuntabilitas menunjukkan bahwa Pemerintah belum melibatkan publik dalam proses perumusan, implementasi dan evaluasi seluruh kebijakan publik, termasuk dalam proses penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi anggaran daerah. Pemerintah pun belum melakukan internal audit secara lebih intensif untuk mengetahui penyebab adanya peningkatan pengeluaran baik untuk belanja rutin maupun belanja pembangunan.

Dari fenomena tersebut dapat kita lihat bahwa kinerja keuangan Pemerintah Daerah masih banyak yang harus di benahi. Banyak program-program kegiatan pemerintah yang belum berjalan dengan efektif. Untuk itu sangat diperlukan akuntabilitas serta transparansi agar program kegiatan yang dilaksanakan pemerintah tersebut dapat berjalan dengan efektif. Pemerintah selaku lembaga perwakilan dari masyarakat

seharusnya dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Dalam hal ini pemerintah dituntut untuk lebih transparan dan akuntabel dalam mengelola keuangan daerah agar keinginan dan pertanggungjawabannya kepada masyarakat dapat terpenuhi. Kinerja keuangan daerah ini harus dapat lebih ditingkatkan demi terciptanya kemajuan kesejahteraan secara nyata dengan bekerja keras, dan menciptakan komunikasi tanpa curiga dengan masyarakat (*publik*).

Berdasarkan uraian diatas dan pentingnya partisipasi publik dan akuntabilitas dalam kinerja keuangan daerah, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul **“Pengaruh Partisipasi Publik dan Akuntabilitas terhadap Kinerja Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten Pesisir Selatan).”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas masalah yang dapat diidentifikasi adalah:

1. Sejauhmana pengaruh transparansi terhadap kinerja keuangan daerah.
2. Sejauhmana pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja keuangan daerah.
3. Sejauhmana pengaruh partisipasi publik terhadap kinerja keuangan daerah.
4. Bagaimana kinerja keuangan pemerintah kota Padang.
5. Sejauhmana pengaruh *value for money* terhadap akuntabilitas publik

C. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis membatasi permasalahan yang akan di bahas, yaitu sejauhmana pengaruh partisipasi publik dan akuntabilitas terhadap kinerja keuangan daerah.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah maka

permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Sejauhmana pengaruh partisipasi publik terhadap kinerja keuangan daerah.

Sejauhmana pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja keuangan daerah.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan pokok diatas, maka secara spesifik penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Pengaruh partisipasi publik terhadap kinerja keuangan daerah.
2. Pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja keuangan daerah.

F. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat berguna:

1. Bagi penulis, diharapkan dapat menambah wawasan dan memperkaya literatur mengenai pengaruh transparansi dan akuntabilitas publik dalam kinerja keuangan daerah.
2. Bagi akademis, sebagai bahan masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di Universitas Negeri Padang.
3. Bagi Pemerintah, sebagai masukan dalam mewujudkan kinerja keuangan daerah yang baik dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik.

KAJIAN TEORITIS, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori

1. Kinerja

a. Pengertian Kinerja

Menurut Peraturan Pemerintah No.8 tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah:

“Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.”

Menurut Mahsun (2006) kinerja (*performance*) dapat diartikan sebagai berikut:

“Kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi.”

Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu. Kinerja biasa diketahui jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolok ukurnya.

b. Pengukuran kinerja

Pengukuran kinerja adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas: efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa; kualitas barang dan jasa (seberapa baik barang dan jasa diserahkan kepada pelanggan dan sampai seberapa jauh pelanggan terpuaskan); hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan; dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan.

Whittaker dalam Mahsun (2006) menjelaskan bahwa pengukuran kinerja

merupakan suatu alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Jadi pengukuran kinerja merupakan suatu metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran, dan strategi sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas.

a. Keuangan Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 keuangan daerah adalah:

“Semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.”

Pada PP Nomor 105 tahun 2000 pasal 5 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, yang menyebutkan bahwa:

"Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka menyelenggarakan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka anggaran dan belanja daerah."

Menurut Abdul Halim (2007: 23) keuangan daerah dapat diartikan sebagai berikut:

“Semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, juga segala sesuatu, baik berupa uang maupun barang, yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh Negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku.”

Dari definisi tersebut dapat diperoleh kesimpulan, yaitu:

1. Yang dimaksud dengan semua hak adalah hak untuk memungut sumber-sumber penerimaan daerah, seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan lain-lain, dan atau hak untuk menerima sumber-sumber penerimaan lain seperti dana alokasi umum dan dana alokasi khusus sesuai peraturan yang ditetapkan. Hak tersebut dapat menaikkan kekayaan daerah.
2. Yang dimaksud dengan semua kewajiban adalah kewajiban untuk mengeluarkan uang untuk membayar tagihan-tagihan pada daerah dalam rangka menyelenggarakan fungsi pemerintahan, infrastruktur, pelayanan umum, dan pengembangan ekonomi. Kewajiban tersebut dapat menurunkan kekayaan daerah.

b. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah sebagai pihak yang disertai tugas menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan layanan sosial masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah daerah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak (Sadjiarto, 2000).

Memperbaiki kinerja sektor publik (pemerintahan) memang bukan sekedar masalah teknis belaka, akan tetapi akuntansi sektor publik sebagai alat untuk menciptakan *good governance* memiliki peran yang sangat vital dan signifikan terutama terkait dengan upaya untuk menghasilkan laporan keuangan dan transparansi informasi keuangan pemerintah daerah (Mardiasmo, 2001). Sekarang ini di berbagai departemen sudah mulai dilakukan pembenahan untuk meningkatkan kinerja melalui penerapan prinsip *good governance*. Akuntabilitas sektor publik memiliki peran

yang sangat vital dalam memberikan informasi dan *disclosure* atas aktifitas dan kinerja *financial* pemerintah daerah untuk memfasilitasi terciptanya transparansi dan akuntabilitas publik.

c. Tolok Ukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Salah satu alat untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Daerah adalah tolok ukur kinerja. Yang dimaksud dengan tolok ukur kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja perangkat daerah. Satuan ukur merupakan tolok ukur yang dapat digunakan untuk melihat sampai seberapa jauh unit kerja mampu melaksanakan Tupoksinya. Tolok ukur kinerja ditetapkan dalam bentuk Standar Pelayanan yang ditentukan oleh masing-masing daerah.

Untuk menilai tingkat pelayanan yang diinginkan dapat digunakan indikator sebagai berikut 1) *Input* (masukan), 2) *Process* (proses), 3) *Output* (keluaran), 4) *Outcome* (hasil), 5) *Benefit* (manfaat)

2. Partisipasi Masyarakat

Konsepsi “partisipasi” atau “*participate*” atau “*participation*” berarti mengambil bagian atau mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik suatu negara. Menurut Andrea Cornwall and John Gaventa (Hendra Karianga, 2011:214) dinyatakan bahwa partisipasi adalah proses tumbuhnya kesadaran terhadap hubungan di antara stakeholders yang berbeda dalam masyarakat, yaitu antara kelompok-kelompok sosial dan komunitas dengan pengambil kebijakan dan lembaga jasa lain. Secara sederhana “partisipasi” dapat dimaknai sebagai “*the act of taking part or sharing in something*”. Dua kata yang dekat dengan konsep “partisipasi” adalah keterikatan (*engagement*) dan keterlibatan (*involvement*). Menurut Hardjosoemantri (Hamzah Halim & Kemal Renindo Syahrul Putra, 2009:103) pokok pikiran yang

melandasi perlunya partisipasi masyarakat ialah:

1. memberikan informasi kepada pemerintah;
2. meningkatkan kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan;
3. membantu perlindungan hukum;
4. mendemokratisasikan pengambilan keputusan;

Menurut Hans (Hendra Karianga, 2011: 215) sebagai gejala empiris, ada empat akibat jika sebuah kebijakan dibentuk dengan tidak melibatkan partisipasi masyarakat, yaitu:

1. peraturan atau kebijakan tidak efektif atau tidak mencapai tujuan yang diinginkan;
2. peraturan atau kebijakan tidak implementatif, gagal sejak dini atau tidak dapat dijalankan;
3. peraturan atau kebijakan tidak responsive yaitu sejak direncanakan sudah mendapat penolakan;
4. peraturan atau kebijakan tersebut bukannya memecahkan masalah, masalah semakin menambah masalah dalam masyarakat.

Dengan metode konseptual berjenjang, tujuan dasar dari partisipasi masyarakat dapat tercapai. Tujuan yang dimaksud adalah untuk menghasilkan masukan dan persepsi yang berguna dari warga negara dan masyarakat yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, karena dengan melibatkan masyarakat yang potensial terkena dampak akibat kebijakan dan kelompok kepentingan, para pengambil keputusan dapat menangkap pandangan, kebutuhan dan pengharapan dari masyarakat dan kelompok tersebut, untuk kemudian menuangkannya ke dalam konsep. Pandangan dan reaksi masyarakat itu, sebaliknya akan mendorong pengambil keputusan (stakeholders) untuk menentukan

prioritas, kepentingan dan arah yang pasti dari berbagai faktor.

Jadi, dalam partisipasi, siapapun dapat memainkan peranan secara aktif, memiliki control terhadap kehidupannya sendiri, mengambil peran dalam masyarakat, serta menjadi lebih terlibat dalam pembangunan. Oleh Huntington dan Nelson, partisipasi politik diartikan sebagai kegiatan warga negara sipil (*private citizen*) yang bertujuan memengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Partisipasi (KBBI, 2001: 831) berarti ada keikutsertaan (mengawasi, mengontrol dan memengaruhi) masyarakat dalam suatu kegiatan mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi pelaksanaan.

Untuk menggerakkan partisipasi masyarakat ini setidaknya ada dua hal yang perlu diperhatikan. Pertama sumber daya manusia baik aparatur pemerintah daerah maupun masyarakat umum, kedua sumberdaya alam yang ada di daerah tersebut. Akan tetapi bagi masyarakat daerah perlu juga mengetahui dan memahami kemampuan manajerial dari pemimpin/Kepala Daerahnya. Masyarakat akan percaya dan mendukung pemimpinnya yang mengerti kepentingan masyarakat dan mampu membuktikan rencana pembangunannya sehingga manfaatnya dirasakan betul oleh masyarakat dengan memadukan program pemerintah (pusat). Mengelola sumber daya manusia ini diperlukan kemampuan dan seni tersendiri. Bagi aparatur kesadaran personal dan kolektivitas bahwa mereka adalah abdi negara dan abdi masyarakat, akan menghindarkan mereka dari sikap arogansi kekuasaan dan menganggap rakyat sebagai objek. Justru dengan kesadaran dimaksud itu akan menumbuhkembangkan budaya melayani masyarakat.

3. Akuntabilitas Publik

a. Pengertian Akuntabilitas Publik

Akuntabilitas dalam arti sempit dapat dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban yang mengacu pada kepada siapa organisasi (atau pekerja individu) bertanggung jawab dan untuk apa organisasi (pekerja individu) bertanggung jawab. Dalam pengertian luas, akuntabilitas dapat dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan, pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mahsun, 2006).

Menurut Mardiasmo (2006), akuntabilitas merupakan prinsip pertanggungjawaban yang berarti bahwa proses penganggaran dimulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut. Selain itu, akuntabilitas dapat juga diartikan sebagai kewajiban pembuat keputusan untuk tanggap atas warga perihal kebutuhan mereka dan kemampuan warga untuk meminta pertanggungjawaban pembuat kebijakan atas janji mereka.

Akuntabilitas merupakan konsep yang kompleks yang lebih sulit mewujudkannya daripada memberantas korupsi (Mardiasmo, 2002). Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama dari reformasi sektor publik. Tuntutan akuntabilitas publik mengharuskan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban horizontal bukan hanya pertanggungjawaban

vertikal. Tuntutan yang kemudian muncul adalah perlunya dibuat laporan keuangan eksternal yang dapat menggambarkan kinerja lembaga sektor publik.

Pada dasarnya, akuntabilitas adalah pemberian informasi dan pengungkapan (*disclosure*) atas aktivitas dan kinerja financial kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Mardiasmo, 2006). Pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus dapat menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik yaitu hak untuk tahu, hak untuk diberi informasi, dan hak untuk didengar aspirasinya.

Faktor kritis yang membentuk sistem akuntabilitas publik adalah tergantung pada:

1. Bagaimana kemampuan mendefinisikan dan mengendalikan harapan-harapan yang diselenggarakan (dilakukan) oleh keseluruhan lembaga khusus di dalam atau di luar organisasi.
2. Derajat kontrol keseluruhan terhadap harapan-harapan yang telah didefinisikan.

a. Lingkup Akuntabilitas Publik

Beberapa bentuk dimensi pertanggungjawaban publik oleh pemerintah daerah disampaikan oleh Ellwood (1993) dalam Mardiasmo (2001). Menurutnya terdapat empat dimensi akuntabilitas publik yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu:

1. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum
Akuntabilitas kejujuran (*accountability for probity*) terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), sedangkan akuntabilitas hukum (*legal accountability*) terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain

yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.

2. Akuntabilitas Proses

Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan system informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah biaya. Pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan akuntabilitas proses dapat dilakukan, misalnya dengan memeriksa ada tidaknya *mark up* dan pungutan-pungutan lain di luar yang ditetapkan, serta sumber-sumber inefisiensi dan pemborosan yang menyebabkan mahal biaya pelayanan publik dan kelambanan dalam pelayanan.

3. Akuntabilitas Program

Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.

4. Akuntabilitas Kebijakan

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

A. Penelitian Terdahulu

Achmadi dkk. (2002) menyebutkan bahwa partisipasi merupakan kunci sukses dari pelaksanaan otonomi daerah karena dalam partisipasi menyangkut aspek

pengawasan dan aspirasi. Pengawasan yang dimaksud disini termasuk pengawasan terhadap pihak eksekutif melalui pihak legislatif. Semakin aktif masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan akan berarti semakin sukses pelaksanaan otonomi daerah. Namun kenyataan dilapangan tidak selalu masyarakat berpartisipasi secara aktif dalam proses penyelenggaraan pemerintahan khususnya pada saat penyusunan anggaran (APBD). Menyadari pentingnya aspirasi masyarakat, maka diperlukan langkah startegis agar partisipasi masyarakat bisa berjalan secara kondusif. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah mengoptimalkan peran dari lembaga institusi lokal non pemerintahan seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM), media masa, organisasi kemasyarakatan dan partai politik.

Menurut penelitian Setyawan (2002) tentang Kinerja Anggaran Keuangan Daerah Pemerintah Kota Malang dilihat dari Perspektif Akuntabilitas, hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah belum melibatkan publik (dalam hal ini termasuk, pers, tokoh masyarakat, LSM dan kelompok sosial lainnya) dalam proses perumusan, implementasi dan evaluasi seluruh kebijakan publik, termasuk dalam proses penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi anggaran daerah. Keikutsertaan publik tersebut dapat membentuk pola kerja yang mengarah pada manfaat, ekonomis, efektivitas dan efisiensi dalam bingkai otonomi daerah yang menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas publik. Dengan demikian masyarakat dapat memberikan kontrol kepada pemerintah tentang kebijakan pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah belum melakukan internal audit secara lebih intensif untuk mengetahui penyebab adanya peningkatan pengeluaran baik untuk belanja rutin maupun belanja pembangunan.

B. Hubungan Antar Variabel

a) Pengaruh Transparansi Publik Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Pada SKPD di Kabupaten Pesisir Selatan

Konsepsi “partisipasi” atau “*participate*” atau “*participation*” berarti mengambil bagian atau mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik suatu negara. Menurut Andrea Cornwall and John Gaventa (Hendra Karianga, 2011:214) dinyatakan bahwa partisipasi adalah proses tumbuhnya kesadaran terhadap hubungan di antara stakeholders yang berbeda dalam masyarakat, yaitu antara kelompok-kelompok sosial dan komunitas dengan pengambil kebijakan dan lembaga jasa lain. Secara sederhana “partisipasi” dapat dimaknai sebagai “*the act of taking part or sharing in something*”. Dua kata yang dekat dengan konsep “partisipasi “ adalah keterikatan (*engagement*) dan keterlibatan (*involvement*).

Penjaringan aspirasi masyarakat merupakan bagian integral dari upaya untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi DPRD yang merupakan misi utama dikeluarkannya Undang-undang Otonomi Daerah Tahun 1999. Pada dasarnya ada tiga elemen penting yang segmental saling bersentuhan dan menentukan kinerja (*performance*) pengelolaan keuangan daerah yaitu stakeholder, Pemerintah Daerah, dan DPRD.

Dapat dilihat disini bahwa semakin tinggi partisipasi masyarakat maka akan semakin pula proses pengawasan yang mengindikasikan akan meningkatkan kinerja keuangan dan juga pengelolaan keuangan daerah seperti

beberapa penelitian yang menyatakan partisipasi masyarakat memberikan masukan yang baik terhadap kinerja keuangan daerah. Hal ini sesuai dengan Achmadi dkk. (2002) menyebutkan bahwa partisipasi merupakan kunci sukses dari pelaksanaan otonomi daerah karena dalam partisipasi menyangkut aspek pengawasan dan aspirasi.

Dalam proses penyusunan APBD partisipasi masyarakat masih dalam tahap *tokenisme* melalui tahapan penentruman, penginformasian dan konsultasi. Hal ini disebabkan belum adanya peraturan hukum yang mengatur tentang partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan dan pelaksanaan APBD Kota Malang. Partisipasi masyarakat ini menunjukkan bahwa masyarakat merasa terlibat dan merasa bagian dari pembangunan. Hal ini akan sangat berdampak positif terhadap keberhasilan pelaksanaan suatu program pembangunan (Soetomo, 2006). Mikkelsen (2003) ,mengatakan bahwa pembangunan pada dasarnya merupakan proses perubahan sikap dan perilaku. Partisipasi masyarakat yang semakin meningkat baik secara kualitatif maupun kuantitatif merupakan salah satu perwujudan dari perubahan sikap dan perilaku tersebut.

b) Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Pada SKPD di Kabupaten Pesisir Selatan

Menurut Mardiasmo (2006), akuntabilitas merupakan prinsip pertanggungjawaban yang berarti bahwa proses penganggaran dimulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui

anggaran tersebut tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut. Selain itu, akuntabilitas dapat juga diartikan sebagai kewajiban pembuat keputusan untuk tanggap atas warga perihal kebutuhan mereka dan kemampuan warga untuk meminta pertanggungjawaban pembuat kebijakan atas janji mereka.

Akuntabilitas merupakan dasar dari pelaporan keuangan di pemerintahan. Akuntabilitas adalah tujuan tertinggi dari pelaporan keuangan pemerintah. Akuntabilitas meliputi informasi keuangan kepada masyarakat dan pemakai lainnya sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas seluruh aktifitas yang dilakukan.

Menurut Aheruddin (2008), dengan diterapkannya akuntabilitas, maka akan menghasilkan pengelolaan keuangan daerah (yang tertuang dalam APBD) yang benar-benar mencerminkan kepentingan dan pengharapan masyarakat daerah setempat secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.

C. Kerangka Konseptual

Kinerja keuangan daerah akan berjalan dengan baik apabila transparansi dan akuntabilitas publik sudah dapat diterapkan dalam mengelola keuangan daerah. Pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk memperbaiki kinerja pemerintah, serta untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan. Untuk memperbaiki kinerja keuangan pemerintah perlu diciptakannya transparansi agar masyarakat dapat mengetahui dana

publik yang digunakan oleh pemerintah daerah. Begitu juga dengan akuntabilitas publik, dengan adanya akuntabilitas publik pemerintah dapat bertanggung jawab atas kinerjanya dalam mengelola dana publik. Dengan adanya beberapa elemen dari *good governance* tersebut kinerja keuangan pemerintah daerah dapat berjalan dengan baik.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat digambarkan kerangka konseptual penelitian sebagai berikut:

Gambar 1.

Kerangka Konseptual

D. Hipotesis

H-1 : Partisipasi Publik berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan daerah

H-2 : Akuntabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan daerah

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka jenis penelitian ini tergolong pada penelitian kausatif. Penelitian kausatif berguna untuk menganalisis pengaruh antara satu variabel dengan variabel lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa jauh variabel bebas mempengaruhi variabel terikat (Umar, 2005). Penelitian ini menjelaskan dan menggambarkan serta memperlihatkan pengaruh akuntabilitas dan partisipasi publik sebagai variabel independen dengan Kinerja keuangan daerah sebagai variabel dependennya.

B. Populasi, Sampel Dan Responden

1. Populasi

Populasi adalah kumpulan dari seluruh elemen yang sejenis yang dapat dibedakan satu sama lainnya, disebabkan adanya nilai karakteristik yang berlainan. Populasi dealam penelitian ini adalah

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di kabupaten Pesisir Selatan.

2. Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah sebagian yang diambil dari populasi yang akan diselidiki. Adapun teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *judgement sampling*. *Judgement sampling* merupakan teknik pengambilan sampel yang berdasarkan penilaian peneliti bahwa dia adalah pihak yang paling baik untuk dijadikan sampel penelitiannya. Dimana yang menjadi sampel dalam penelitaian ini adalah seluruh SKPD yang ada di kabupaten Pesisir Selatan yang terdiri dari 45 SKPD. Kabupaten Pesisir Selatan dipilih menjadi sampel dikarenakan, jika kita lihat kasus yang terjadi, sebagian SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang memperlihatkan realisasi keuangannya belum mencapai target dari anggaran yang telah ditetapkan.

Akuntabilitas dan partisipasi publik yang seharusnya dapat meningkatkan kinerja keuangan ternyata tidak terlaksana dengan optimal, selain itu pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang merupakan salah satu kabupaten yang memiliki objek wisata yang cukup diminati di Provinsi Sumatera Barat jika dilihat hasil audit laporan keuangan beberapa tahun terakhir masih mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian, untuk itu pada penelitian ini, penulis memilih Kabupaten Pesisir Selatan sebagai sampel dalam penelitian.

Jumlah sampel dalam penelitian ini dapat dilihat dari Tabel 1 berikut :

Tabel 1

Daftar Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Painan

(Sumber: Badan Kepagawain Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, 2014)

3. Responden

Responden dalam penelitian ini adalah pimpinan SKPD dan 2 orang kepala bagian pada masing-masing SKPD, sehingga responden berjumlah 123 orang. Dipilihnya pimpinan SKPD dan kepala bagian pada suatu SKPD karena kepala SKPD atau kepala bagian bertanggungjawab untuk baik atau buruknya kinerja SKPD nya dan mereka terlibat langsung dalam melaksanakan kegiatan yang operasional pemerintahan serta sangat memahami dalam mengatur (*me-manage*) kegiatan di masing-masing bagian.

C. Jenis dan Sumber data

1. Jenis Data

Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data subyek (*Self-Report data*). Data subyek adalah jenis data penelitian yang berupa opini, sikap pengalaman atau karakteristik dari seseorang atau kelompok orang yang menjadi subyek penelitian (responden).

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber yang asli (tidak melalui media perantara). Data primer dikumpulkan secara khusus oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data primer diperoleh dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah terstruktur dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi dari para responden

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk memperoleh data

penelitian. Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara survey lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data original. Data untuk penelitian ini dikumpulkan dengan cara menyebarkan kuesioner tertutup. Kuesioner disebarkan secara langsung ke responden, demikian pula pengembaliannya dijemput sendiri sesuai dengan janji pada kantor instansi pemerintah tersebut. Responden diharapkan mengembalikan kembali kuesioner kepada peneliti dalam waktu yang telah ditentukan.

E. Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua variabel antara lain:

1. Variabel Terikat (Y)

Variabel terikat (*dependent variabel*) adalah variabel yang menjadi perhatian utama dalam sebuah pengamatan. Pengamatan akan dapat mendeteksi atau menerangkan variabel dalam variabel terikat beserta perubahannya yang terjadi kemudian. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan satuan kerja perangkat daerah.

2. Variabel Bebas (X)

Variabel bebas (*independent variable*) adalah variabel yang dapat mempengaruhi perubahan dalam variabel terikat (*dependent variable*) dan mempunyai pengaruh positif ataupun negatif bagi variabel terikat nantinya. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah:

- a. Akuntabilitas Publik (X_1)
- b. Partisipasi Publik (X_2)

F. Pengukuran Variabel

Pengukuran variabel dalam penelitian ini menggunakan skala likert dengan lima alternatif jawaban masing-masing diberi skor yaitu: Sangat Setuju

(SS), Setuju (S), Ragu-Ragu (RR), Tidak Setuju (TS), Sangat Tidak Setuju (STS), yang digunakan untuk mengukur variabel independen, sedangkan untuk variabel dependen adalah kuesioner (*self rating*) yang dikembangkan oleh Mahoney *et. al* (1963). Setiap responden diminta untuk mengukur sendiri kinerjanya dengan memilih dan/atau menuliskan skala antara 1-9. Skala 1-3 mewakili kinerja di bawah rata-rata, skala 4-6 mewakili kinerja rata-rata dan skala 7-9 mewakili kinerja di atas rata-rata. Menurut Sugiyono (2008) dengan skala likert variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel, kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan. Besarnya skor yang diberikan untuk masing-masing alternatif jawaban dapat dilihat pada Tabel 2 dibawah ini :

Tabel

2.

Daftar Skor Jawaban

Pernyataan Berdasarkan Sifat

G. Instrumen Penelitian

Menurut Sugiyono (2005:97), instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Instrumen dikembangkan mengacu kepada karakteristik penelitian yang diukur sesudah selesai mengkaji hubungan dengan variabel yang diteliti.

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk mengukur variabel dalam rangka mengumpulkan data. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuisisioner. Variabel-variabel yang diukur dalam kuisisioner mencakup: 1) Akuntabilitas Publik, 2) Partisipasi Publik. Kuisisioner terdiri dari sejumlah pertanyaan tertutup yang menggunakan skala likert dengan lima alternatif jawaban.

Kuisisioner Kinerja keuangan SKPD, Akuntabilitas publik dan Partisipasi publik diadopsi dari penelitian terdahulu Silvia Karsa (2010) dan Widya Sari (2009)

Tabel 3.

Kisi-Kisi Instrumen Penelitian

H. Uji Validitas dan Reliabilitas

1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuisisioner. Suatu kuisisioner dikatakan valid jika pertanyaan mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuisisioner tersebut. Uji validitas pada penelitian ini menggunakan *Corrected Product Moment*.

Jika r hitung $>$ r table dan bernilai positif maka butir pernyataan atau indikator tersebut dinyatakan valid. *Pilot test* akan dilakukan pada mahasiswa akuntansi FE UNP Konsentrasi sektor publik. Hal ini di karenakan mahasiswa akuntansi konsentrasi sektor publik memiliki pemahaman yang lebih memadai dibandingkan konsentrasi lain

2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuisisioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuisisioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konstan atau stabil dari waktu ke waktu. Dalam penelitian ini, uji reliabilitas menggunakan *Cronbach Alpha* (α).

Sekaran (2003) menyatakan cara mengukur reliabilitas dengan *Cronbach Alpha's* dengan criteria sebagai berikut :

- a. Kurang dari 0,6 tidak reliabel
- b. 0,6-0,7 akseptabel
- c. 0,7-0,8 baik
- d. Lebih dari 0,8 reliabel

Jika semakin dekat koefisien alpha pada nilai berarti butir pertanyaan dalam koefisien ini semakin reliabel.

I. Hasil Uji Coba Instrumen

Hasil pengujian ini bertujuan untuk melihat seberapa kuat butir-butir variabel yang ada pada penelitian ini. Uji coba instrumen dilakukan pada mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi UNP dengan syarat telah mengambil mata kuliah Akuntansi Sektor Publik Lanjutan, Auditing, dan Seminar Akuntansi Sektor Publik, dengan jumlah responden sebanyak 30 orang.

Untuk melihat validitas dari masing-masing item kuesioner digunakan *Corrected Item-Total Correlation*. Jika r_{hitung} besar dari r_{tabel} maka dapat dikatakan valid. Dimana r_{tabel} untuk $n = 30$ adalah 0.3550. Berdasarkan hasil pengolahan data didapat nilai *Corrected Item-Total Correlation* untuk masing-masing item variabel X_1 , X_2 , dan Y semuanya diatas r_{tabel} . Jadi dapat dikatakan bahwa semua item pertanyaan variabel X_1 , X_2 , dan Y adalah valid. Berikut ini merupakan tabel nilai *Cronbach's Alpha* masing-masing instrumen:

Tabel 3

Nilai *Cronbach's Alpha* dan *Corrected Item-Total Correlation* Instrumen Penelitian

Sumber: Pengolahan data statistik SPSS versi 16 (2014)

J. Model dan Teknik Analisis

1. Model

Alat analisis regresi berganda digunakan untuk melihat pengaruh beberapa variabel independen terhadap variabel dependen. Persamaan regresi untuk menguji hipotesis tersebut adalah sebagai berikut:

$$Y \text{ (KKSKPD)} = a + b_1 \text{ AP} + b_2 \text{ PP} + e$$

(Ghozali,2006:85)

Dimana:

Y = Kinerja Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

a = Konstanta

$b_{1,2}$ = Koefisien regresi dari variabel independen

e = *error term*

AP = Akuntabilitas Publik

PP = Partisipasi Publik

2. Teknik Analisis Data

a. Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik bertujuan untuk melihat kelayakan model serta untuk melihat apakah terdapat pelanggaran asumsi klasik dalam model regresi berganda, karena model regresi yang baik adalah model yang lolos dari pengujian asumsi klasik. Terdapat tiga asumsi dasar yang harus dipenuhi oleh model regresi agar parameter estimasi tidak bias, yaitu:

1) Uji Normalitas Residual

Sebelum melakukan pengujian terhadap hipotesis, terlebih dahulu dilakukan uji normalitas residual untuk mengetahui metode statistik yang akan digunakan. Uji ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Uji normalitas residual dilakukan dengan menggunakan *One Sample Kolmogorov-Smirnov test* dengan taraf signifikan 5%. Dasar pengambilan keputusan sebagai berikut:

- a. Jika nilai $\text{Sig} \geq 0,05$ maka dikatakan berdistribusi normal.
- b. Jika nilai $\text{Sig} < 0,05$ maka dikatakan berdistribusi tidak normal.

2) Uji Multikolenearitas

Multikolenearitas adalah situasi adanya korelasi variabel-variabel bebas diantara satu dengan lainnya, maka salah satu variabel bebas tersebut dieliminir. Untuk menguji adanya multikolenearitas dapat dilihat melalui nilai *Variance Inflation Factor (VIF)* < 10 dan *tolerance* $> 0,1$.

3) Uji Heterokedastisitas

Uji ini dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual atas suatu pengamatan ke pengamatan lain. Konsep heterokedastisitas atau homokedastisitas didasarkan pada penyebaran varians variabel dependen diantara rentang nilai variabel independen. Untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas dapat menggunakan uji glejser. Apabila $\text{sig} \geq 0,05$ maka tidak terdapat gejala heteroskedastisitas. Model yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas.

b. Uji Model (*Goodness Fit of Model*)

1) Uji F (F-test)

Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas dalam model berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Selain itu, uji F dapat digunakan untuk melihat model regresi yang digunakan sudah signifikan atau belum, dengan

ketentuan bahwa jika $p \text{ value} < (\alpha) = 0,05$ dan $f_{\text{hitung}} > f_{\text{tabel}}$, berarti model tersebut signifikan dan bisa digunakan untuk menguji hipotesis. Dengan tingkat kepercayaan untuk pengujian hipotesis adalah 95% atau $(\alpha) = 5\% (0.05)$.

2) Koefisien Determinasi (*Adjusted R Square*)

Koefisien determinasi (*R Square*) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variansi variabel terikat. *Adjusted R Square* berarti *R Square* sudah disesuaikan dengan derajat masing-masing jumlah kuadrat yang tercakup dalam perhitungan *Adjusted R Square*. nilai koefisien determinasi adalah nol atau satu. Nilai *Adjusted R Square* yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas.

3) Uji Hipotesis (*t-Test*)

Uji t bertujuan untuk menguji pengaruh secara parsial antara variabel bebas terhadap variabel tidak bebas dengan variabel lain dianggap konstan, dengan asumsi bahwa jika signifikan nilai t hitung yang dapat dilihat dari analisa regresi menunjukkan kecil dari $\alpha = 5\%$, berarti variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

Dengan tingkat kepercayaan untuk pengujian hipotesis adalah 95% atau $(\alpha) = 0.05 (5\%)$. Dengan kriteria sebagai berikut:

- a) Jika tingkat signifikansi $< \alpha$ 0,05 dan koefisien regresi (β) positif maka hipotesis diterima yang berarti tersedia cukup bukti untuk

- menolak H_0 pada pengujian hipotesis 1,2 atau dengan kata lain tersedia bukti untuk menerima H_1 dan H_2 .
- b) Jika tingkat signifikansi $< 0,05$ dan koefisien regresi (β) negatif maka hipotesis ditolak dan berarti tidak tersedia cukup bukti untuk menerima Hipotesis.
- c) Jika tingkat signifikansi $> \alpha$ $0,05$ dan koefisien regresi (β) positif maka hipotesis ditolak yang berarti tidak tersedia cukup bukti untuk menerima hipotesis.

K. Definisi Operasional

Untuk lebih memudahkan dalam penulisan dan untuk menghindari penafsiran yang berbeda pada penelitian ini, maka perlu menjelaskan definisi operasional variabel sebagai berikut:

1. Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja Keuangan Daerah adalah suatu penilaian mengenai tingkat pencapaian Pemerintah daerah sebagai pihak yang diserahi tugas menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan layanan sosial masyarakat yang mempunyai kewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah daerah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Kinerja keuangan daerah ini dapat diukur melalui Standar Analisa Belanja (SAB), tolok ukur kinerja, dan standar biaya. Namun dalam penelitian ini penulis hanya membatasi alat ukur mengenai kinerja keuangan daerah hanya pada tolok ukur kinerja saja.

2. Akuntabilitas Publik

Akuntabilitas publik merupakan suatu bentuk pertanggung jawaban pemerintah kepada publik atas kinerja yang telah dilakukan. Terdapat empat unsur akuntabilitas publik yang harus dipenuhi, diantaranya adalah akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum, akuntabilitas program, akuntabilitas proses, dan akuntabilitas kebijakan.

3. Partisipasi Publik

Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Deskripsi Hasil Penelitian

Berikut ini merupakan deskripsi dari hasil penelitian tentang pengaruh partisipasi publik dan akuntabilitas terhadap kinerja keuangan daerah. Untuk mendeskripsikan variabel-variabel tersebut dapat dikategorikan dalam:

a. Distribusi Variabel Partisipasi Publik (X_1)

Variabel partisipasi publik terdiri dari indikator 1) Tujuan, 2) Kinerja, 3) Standar, 4) Jangka Waktu, 5) Sasaran Prioritas, 6) Tingkat Kesulitan Koordinasi. Sub variabel tersebut tersebar dalam 11 item pertanyaan pada kuesioner. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 9 berikut:

Tabel 9
Distribusi Frekuensi Skor
Variabel Partisipasi Publik

Berdasarkan Tabel distribusi frekuensi variabel transparansi diatas, dari 77 responden yang diteliti terlihat bahwa tingkat capaian responden tertinggi yaitu pada item pernyataan nomor 1 mengenai tujuan dilakukannya partisipasi publik dengan nilai 80,52%, sedangkan tingkat capaian responden terendah yaitu item pernyataan nomor 9 mengenai sasaran prioritas dari dilakukannya partisipasi publik dengan tingkat capaian responden 59,48%. Sedangkan tingkat capaian rata-rata dari transparansi adalah sebesar 71,24%. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi publik pada pemerintah dinilai baik. Namun dalam penerapan partisipasi publik dalam kinerja keuangan daerah ini, pemerintah belum sepenuhnya melakukan partisipasi publik dalam kinerja operasional pemerintah diantaranya yaitu mengenai kemudahan masyarakat dalam mengakses dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kebijakan anggaran dan mengenai laporan keuangan pemerintah diaudit oleh lembaga pemeriksa independen, dimana hal dapat digunakan masyarakat dalam menilai kinerja keuangan daerah sehingga partisipasi publik dapat terlaksana dengan lebih efektif.

b. Distribusi Variabel Akuntabilitas (X₂)

Variabel Akuntabilitas Publik terdiri dari indikator 1) Akuntabiitas Kejujuran dan Hukum, 2) Akuntabilitas Proses, 3) Akuntabilitas Program, 4) Akuntabiitas Kebijakan. Variabel Akuntabilitas Publik ini terdiri dari 9 item pernyataan. Data yang diperoleh dari distribusi variabel penerapan sistem pengendalian intern pemerintah adalah sebagai berikut:

Tabel 10 Distribusi Frekuensi Skor Variabel Akuntabilitas

Berdasarkan Tabel distribusi frekuensi variabel akuntabilitas publik di atas, dapat dilihat tingkat capaian responden

tertinggi yaitu pada item pernyataan nomor 9 mengenai akuntabilitas kebijakan dengan tingkat capaian responden sebesar 90,91%, sedangkan tingkat capaian responden terendah yaitu pada item nomor 2 mengenai akuntabilitas kejujuran dan hukum dengan tingkat capaian responden sebesar 80,00%. Untuk tingkat capaian rata-rata yaitu sebesar 86,26%. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan akuntabilitas dalam pemerintah dinilai sudah baik, namun beberapa faktor dinilai masih lemah diantaranya yaitu SKPD belum sepenuhnya mampu meningkatkan ketaatan atas beberapa peraturan dan sedikit kurang sistematis, selain itu masyarakat belum sepenuhnya merasakan manfaat dari pelaksanaan program-program APBD, dimana hal itu merupakan salah satu wujud akuntabilitas yang baik.

c. Distribusi Variabel Kinerja Keuangan Daerah (Y)

Variabel kinerja keuangan daerah terdiri dari empat indikator yaitu 1) *Input*, 2) *Process*, 3) *Output*, 4) *Outcome*, 5) *Benefit*. Jumlah item pernyataannya adalah 14 item. Data yang diperoleh tersebut dapat dilihat pada Tabel 11 berikut:

Tabel 11 Distribusi Frekuensi Skor Variabel Kinerja Keuangan Daerah

Berdasarkan tabel distribusi frekuensi variabel kinerja keuangan daerah di atas, dapat terlihat bahwa tingkat capaian responden tertinggi yaitu item nomor 4 dengan tingkat capaian responden 92,47%, sedangkan untuk tingkat capaian terendah yaitu item pada nomor 8 dengan tingkat capaian responden 55,58%, dan untuk tingkat capaian rata-rata sebesar 79,35%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja

keuangan daerah yang dihasilkan oleh pemerintah sudah cukup baik dan efektif.

Uji Instrumen

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan, maka selanjutnya dilakukan analisis data untuk mendapatkan hasil penelitian. Dalam melakukan analisis data digunakan teknik regresi berganda dengan menggunakan program perhitungan statistik SPSS versi 16.

1. Uji Validitas

Uji validitas menggunakan rumus *korelasi products moment* dapat dilihat pada *corrected item-total correlation* dengan bantuan alat analisis SPSS. Uji validitas dilakukan dengan kriteria jika $r_{hitung} \geq r_{tabel}$ maka item pernyataan dinyatakan valid dan jika $r_{hitung} \leq r_{tabel}$ maka item pernyataan dinyatakan tidak valid. Nilai r_{tabel} untuk $N = 77$ adalah 0.225. Berdasarkan hasil pengolahan didapatkan nilai *Corrected Item-Total Correlation* untuk masing-masing variabel X_1 , X_2 , dan Y semuanya di atas r_{tabel} . Jadi dapat dikatakan bahwa seluruh item pernyataan variabel X_1 , X_2 , dan Y adalah valid. Berikut ini merupakan nilai *Corrected Item-Total Correlation* terkecil dari masing-masing instrumen:

Tabel 13

Nilai *Corrected Item-Total Correlation* terkecil

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui sejauhmana hasil penelitian tetap konsisten. Berikut ini merupakan tabel nilai *Cronbach's Alpha* masing-masing instrumen:

Tabel 12

Nilai *Cronbach's Alpha*

Keandalan konsistensi antar item atau koefisien keandalan *Cronbach's Alpha* yang terdapat pada tabel di atas yaitu untuk instrumen partisipasi publik 0,808, untuk

instrumen akuntabilitas 0,763, dan untuk instrumen kinerja keuangan daerah 0,812. Data ini menunjukkan nilai yang berada pada kisaran diatas 0,8. Dengan demikian semua instrumen penelitian dapat dikatakan reliabel.

3. Uji Asumsi Klasik

Sebelum data diolah dengan regresi berganda maka dilakukan uji asumsi klasik untuk memperoleh keyakinan bahwa data yang diperoleh beserta variabel penelitian layak untuk diolah lebih lanjut. Uji asumsi klasik dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Uji Normalitas Residual

Tabel 16

Uji Normalitas

Sumber : Olahan data SPSS 16 (2014)

Dari hasil pengolahan SPSS versi 16.0 didapat bahwa nilai seluruh variabel dari *kolmogorov smirnov* $> 0,05$, yaitu 0,376. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa data berdistribusi secara normal.

2. Uji multikolinearitas

Untuk menguji adanya multikolinearitas dapat dilihat melalui nilai *Variance Inflation Factor (VIF)* < 10 dan *tolerance* > 0.1 . Variabel partisipasi publik (X_1) dan akuntabilitas (X_2) dengan nilai VIF 1,086 adalah nilai VIF yang kecil dari 10, dan nilai *tolerance* adalah 0,921 $> 0,1$. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tidak terdapat korelasi variabel-variabel bebas antara satu dengan yang lainnya, atau variabel independent pada penelitian ini bebas multikol. Ini dapat dilihat pada Tabel 16 sebagai berikut:

3. Uji Heterokedastisitas

Tabel 18

Koefisien Uji Glejser

Sumber : Olahan data SPSS 16 (2014)

Berdasarkan Tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai sig variabel-variabel $> 0,05$ (sig $> 0,05$), maka dapat dikatakan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas pada penelitian ini.

4. Pengujian Metode Penelitian

a. Koefisien Determinasi (Nilai *Adjusted R Square*)

Tabel 19

Adjusted R Square

Sumber : Olahan data SPSS 16 (2014)

Dari tabel di atas dapat dilihat nilai *Adjusted R Square* menunjukkan 0,210. Hal ini mengindikasikan bahwa kontribusi variabel bebas yaitu transparansi dan akuntabilitas publik terhadap variabel terikat yaitu kinerja keuangan daerah adalah sebesar 21%, sedangkan 79% ditentukan oleh faktor lain diluar model.

b. Model Persamaan Regresi

Tabel 20

Koefisien Regresi Berganda

Sumber : Olahan data SPSS 16 (2014)

Berdasarkan Tabel di atas dapat dianalisis model estimasi sebagai berikut:

$$Y = 22.074 + 0.345(X_1) + 0.309(X_2)$$

Dimana:

X_1 = Partisipasi Publik

X_2 = Akuntabilitas

Y = Kinerja Keuangan Daerah

Dari persamaan diatas dapat dijelaskan bahwa:

- Nilai konstanta sebesar 22.074 mengindikasikan bahwa jika variabel independen yaitu Partisipasi publik dan akuntabilitas adalah nol maka nilai kinerja keuangan daerah adalah sebesar konstanta (22.074).
- Koefisien Partisipasi publik sebesar 0.345 mengindikasikan bahwa setiap peningkatan partisipasi publik satu satuan akan mengakibatkan peningkatan kinerja keuangan daerah

sebesar 0.345 satuan. Nilai koefisien β dari variabel X_1 bernilai positif 0.345.

- Koefisien akuntabilitas sebesar 0.309 mengindikasikan bahwa setiap peningkatan akuntabilitas satu satuan akan mengakibatkan peningkatan kinerja keuangan daerah sebesar 0.309 satuan. Nilai koefisien β dari variabel X_2 bernilai positif yaitu 0.309. Hal ini dapat membuktikan Partisipasi publik dan akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah.

c. Uji F (F Test)

Tabel 21

Uji F

Sumber : Olahan data SPSS 16 (2014)

Uji F dilakukan untuk menguji apakah secara serentak variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen secara baik atau untuk menguji apakah model yang digunakan telah *fix* atau tidak. Berdasarkan Tabel 18 nilai sig 0,000 menunjukkan bahwa variabel independen secara bersama-sama mampu menjelaskan variabel dependen, berarti model *fix* digunakan untuk uji t statistik yang menguji variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen.

d. Uji t (t-test)

Uji t dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Patokan yang digunakan untuk pengujian hipotesis dilakukan dengan membandingkan (a) t_{hitung} dengan t_{tabel} atau (b) nilai sig dengan alpha yang diajukan yaitu 0,05. Setelah itu dilihat nilai β untuk melihat arah hipotesis.

Hipotesis diterima jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan nilai sig < 0.05 . Berdasarkan nilai t_{hitung} dan signifikansi yang diperoleh dapat dilihat pada tabel 24, maka uji hipotesis dapat dilakukan sebagai berikut :

a. Pengujian Hipotesis 1

Pengujian hipotesis pertama dilakukan dengan membandingkan nilai t hitung dan t tabel. Hipotesis diterima jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau nilai $sig < \alpha$ 0,05. Nilai t_{tabel} pada α 0,05 adalah 1,9925. Untuk variabel partisipasi publik (X_1) nilai t_{hitung} adalah 3.096 dan nilai sig adalah 0,003. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $3.096 > 1,9925$ atau nilai signifikansi $0,003 < \alpha$ 0,05. Nilai koefisien β dari variabel X_1 bernilai positif yaitu 0.345. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini dapat membuktikan bahwa Partisipasi publik (X_1) berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja keuangan daerah. Sehingga hipotesis pertama dari penelitian ini diterima.

b. Pengujian Hipotesis 2

Pengujian hipotesis kedua dilakukan dengan membandingkan nilai t hitung dan t tabel. Hipotesis diterima jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau nilai $sig < \alpha$ 0,05. Nilai t_{tabel} pada α 0,05 adalah 1,9925. Nilai t_{hitung} untuk variabel akuntabilitas (X_2) adalah 2.179 dan nilai sig 0,032. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2.179 > 1.9925$ atau nilai signifikansi $0,032 < \alpha$ 0,05. Nilai koefisien β dari variabel X_2 bernilai positif yaitu 0.309. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini dapat membuktikan akuntabilitas (X_2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Sehingga hipotesis kedua dari penelitian ini dapat diterima.

B. Pembahasan

a. Pengaruh Partisipasi Publik terhadap Kinerja Keuangan Daerah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi publik berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan daerah dengan nilai $t = 3.096$

dan nilai signifikansi $0,003 < \alpha = 0,05$. Hal ini dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi partisipasi publik, maka kinerja keuangan daerah yang dihasilkan oleh pemerintah juga akan semakin meningkat.

Hal ini sesuai dengan teori yang dinyatakan oleh Achmadi, dkk (2002) bahwa partisipasi merupakan kunci sukses dari pelaksanaan otonomi daerah karena dalam partisipasi menyangkut aspek pengawasan dan aspirasi. Selain itu partisipasi masyarakat ini menunjukkan bahwa masyarakat merasa terlibat dan merasa bagian dari pembangunan. Hal ini akan sangat berdampak positif terhadap keberhasilan pelaksanaan suatu program pembangunan (Soetomo, 2006).

Konsepsi “partisipasi” atau “*participate*” atau “*participation*” berarti mengambil bagian atau mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik suatu negara. Menurut Andrea Cornwall and John Gaventa (Hendra Karianga, 2011:214) dinyatakan bahwa partisipasi adalah proses tumbuhnya kesadaran terhadap hubungan di antara stakeholders yang berbeda dalam masyarakat, yaitu antara kelompok-kelompok sosial dan komunitas dengan pengambil kebijakan dan lembaga jasa lain. Secara sederhana “partisipasi” dapat dimaknai sebagai “*the act of taking part or sharing in something*”. Dua kata yang dekat dengan konsep “partisipasi” adalah keterikatan (*engagement*) dan keterlibatan (*involvement*).

Penjaringan aspirasi masyarakat merupakan bagian integral dari upaya untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi

DPRD yang merupakan misi utama dikeluarkannya Undang-undang Otonomi Daerah Tahun 1999. Pada dasarnya ada tiga elemen penting yang segmental saling bersentuhan dan menentukan kinerja (*performance*) pengelolaan keuangan daerah yaitu stakeholder, Pemerintah Daerah, dan DPRD.

Dari hasil penelitian yang diperoleh pada data distribusi frekuensi untuk variabel partisipasi publik. Dimana tingkat capaian responden untuk variabel partisipasi publik adalah 71,24%, ini memperlihatkan bahwa nilai TCR berada pada kategori baik. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan partisipasi publik cukup efektif sehingga dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah baik di bidang keuangan maupun di bidang lain. Adanya kesinambungan antara pemerintah dan masyarakat akan membangun rasa percaya dan menimbulkan peningkatan kinerja di segala aspek. Pada penelitian ini dapat dibuktikan bahwa partisipasi publik memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap peningkatan kinerja keuangan daerah

b. Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kinerja Keuangan Daerah.

Hipotesis kedua penelitian ini menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan daerah yang dihasilkan oleh pemerintah. Berdasarkan analisis regresi diketahui bahwa hasil penelitian menunjukan bahwa akuntabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan daerah. Pengaruh antara akuntabilitas dengan kinerja keuangan daerah adalah bahwa semakin tinggi akuntabilitas publik maka kinerja keuangan daerah yang dihasilkan oleh pemerintah juga akan tercapai.

Pernyataan ini juga sejalan dengan Prasetyantoko (2008) yang menyatakan bahwa untuk meningkatkan kinerja yaitu melalui penerapan prinsip *good governance*, dimana salah satu dari elemen *good governance* tersebut adalah akuntabilitas publik. Akuntabilitas adalah pemberian informasi dan pengungkapan (*disclosure*) atas aktivitas dan kinerja financial kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Mardiasmo, 2006). Pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus dapat menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik yaitu hak untuk tahu, hak untuk diberi informasi, dan hak untuk didengar aspirasinya.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Silvia (2010) yang meneliti tentang pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja keuangan daerah pada SKPD di kota Padang, yang menyatakan bahwa akuntabilitas memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kinerja keuangan daerah. Hasil penelitian ini juga mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Garnita (2008), dimana penelitian tersebut meneliti tentang pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja instansi pemerintah (Studi Kasus Pada Balai Besar Bahan dan Barang Teknik). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa akuntabilitas terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja Balai Besar Bahan dan Barang Teknik (B4T).

Berdasarkan data distribusi frekuensi variabel akuntabilitas publik dapat dilihat bahwa tingkat capaian responden sebesar 86,26% yang berada pada kategori baik. Namun ada beberapa masih lemah dalam penerapan akuntabilitas publik tersebut diantaranya SKPD belum mampu memberikan akses dalam penyampaian Informasi tentang

perubahan kebijakan dan revisi anggaran sebagaimana terlihat dari nilai TCR terendah dari variabel akuntabilitas yaitu 80,00 %. Walaupun TCR nya cukup baik tetapi inilah kelemahan yang harus ditingkatkan dalam penerapan akuntabilitas pada penelitian ini.

Pada saat pemerintah daerah telah menerapkan akuntabilitas publik yang memadai dalam pemerintahan maka kinerja keuangan daerah yang dihasilkan akan meningkat. Hal ini didasarkan pada tujuan akuntabilitas publik adalah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari pengaruh partisipasi publik dan akuntabilitas terhadap Kinerja keuangan daerah adalah sebagai berikut :

1. Partisipasi publik berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja keuangan daerah pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kabupaten Pesisir Selatan. Hipotesis pertama diterima
2. Penerapan Akuntabilitas berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja keuangan daerah pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kabupaten Pesisir Selatan. Hipotesis pertama diterima

B. Keterbatasan dan Saran

a. Keterbatasan

Meskipun peneliti telah berusaha merancang dan mengembangkan penelitian sedemikian rupa, namun masih terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini yaitu:

1. Berdasarkan model penelitian yang digunakan, diketahui bahwa variabel penelitian yang digunakan hanya

dapat menjelaskan sebesar 21%. Sedangkan 79% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti. Sehingga variabel penelitian yang digunakan kurang dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap kinerja manajerial SKPD.

2. Penyebaran kuesioner pada beberapa SKPD masih memiliki kendala dalam prosedur perizinan dan pengisian kuesioner. Hal tersebut menyebabkan data yang diolah kurang optimal, untuk penelitian selanjutnya diharapkan responden yang dituju dapat melakukan pengisian kuesioner yang disebar.
3. Data penelitian yang berasal dari responden yang disampaikan secara tertulis dalam bentuk kuesioner akan mempengaruhi hasil penelitian. Karena persepsi responden yang disampaikan belum tentu mencerminkan keadaan yang sebenarnya (subjektif) dan akan berbeda apabila data diperoleh melalui wawancara langsung dengan responden.

b. Saran

Berdasarkan pada pembahasan dan kesimpulan diatas, maka peneliti menyarankan bahwa:

1. Dari hasil penelitian ini terlihat bahwa partisipasi publik dan akuntabilitas sudah cukup diterapkan dengan efektif, walaupun masih memberikan kinerja keuangan daerah yang masih kurang optimal. Pemerintah harus lebih baik lagi dalam memberikan lingkup partisipasi publik sehingga menciptakan pengawasan yang baik contohnya seperti mengenai kemudahan masyarakat dalam mengakses dokumen-dokumen mengenai kebijakan anggaran. Selain

itu pemerintah juga harus lebih tanggap terhadap keinginan dan kebutuhan publik guna mencapai tujuan dalam menyelenggarakan suatu pemerintahan yang baik. Pemerintah sebaiknya juga melakukan perbaikan secara terus menerus agar kinerja keuangan daerah dapat terus ditingkatkan.

2. Mengenai akuntabilitas publik memang sudah dinilai baik, namun akses yang diberikan masih sedikit lambat dalam penyampaian informasi kebijaka-kebijakan. Oleh sebab itu, sebaiknya pemerintah harus lebih akuntabel terhadap kinerjanya dalam menyelesaikan laporan keuangan. Selain itu pemerintah juga harus lebih maksimal dalam melaksanakan program-program APBD, agar manfaat dari pelaksanaan program/kegiatan yang dilakukan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Hal ini sangat penting, karena dengan begitu kita dapat melihat sejauh mana akuntabilitas pemerintah dalam melaksanakan kinerjanya.

3. Untuk penelitian selanjutnya, dapat dilakukan dengan metode lain untuk mendapatkan data yang lengkap, misalnya dengan melakukan wawancara secara langsung dengan responden dalam pengisian kuesioner sehingga jawaban responden lebih mencerminkan jawaban yang sebenarnya.

Peneliti yang akan melakukan penelitian selanjutnya, sebaiknya melakukan perluasan sampel penelitian atau peneliti dapat memilih SKPD yang berada diuar Kabupaten Pesisir Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Halim. 2004. *Akuntansi Sektor Publik; Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba

Achmadi, A., Muslim, M. dkk, 2002, *Good governance dan Penguatan Institusi Daerah*, Masyarakat Transparansi Indonesia, Jakarta.

Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.

Indra Bastian. 2006. *Akuntansi sektor publik suatu pengantar*. Jakarta: Erlangga

Mahsun, Mohamad, Firma. S, dan Heribertus.2006.*Akuntansi Sektor Publik*. Ed 1. Yogyakarta: BPFY-YOGYAKARTA

Mardiasmo.2001. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.

_____.2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta

_____.2006. *Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UAD Press

_____.2006. *Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik: Suatu Sarana Good Governance*. Vol. 2. Hal. 1-17.

Peraturan Daerah Kota Padang No.17 Tahun 2008."Pembentukan Organisasi Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Kota Padang". Padang.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 2009. "Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah". Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Melalui <<http://www.google.co.id>>. Diakses tanggal [28/03/2009].
- _____. 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Melalui <<http://www.google.co.id>>. Diakses tanggal [28/03/2009].
- Prasetyantoko. 2008. *Corporate Governance*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Republik Indonesia, 2001, *Undang-Undang No. 22 dan 25 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah*, Citra Umbara, Bandung.
- Republik Indonesia, 1999, *Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian*, Jakarta
- Republik Indonesia, 2004, *Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*, Jakarta.
- Republik Indonesia 2004, *Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*, Jakarta.
- Silvia Karsa. 2010. Pengaruh Transparansi dan Akutabilitas Publik Terhadap Kinerja Keuangan Daerah. *Skripsi*. Universitas Negeri Padang.
- Sari, Widya. 2009. Pengaruh Akutabilitas dan Transparansi terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Sumatera Barat. *Skripsi*. Padang. FE UNP
- Setyawan, Setu. 2002. Pengukuran Kinerja Anggaran Keuangan Daerah Pemerintah Kota Malang Dilihat dari Prespektif Akutabilitas. Melalui <<http://www.google.co.id>>. Diakses tanggal [28/03/2009].
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta
- (Tanpa Nama). 2009. 5 Fakta Penyelewengan Dana BOS, Ironi Sekolah Gratis. Melalui <<http://www.google.co.id>>. Diakses tanggal [23/12/2012].
- Ulupui. 2005. Pengaruh Partisipasi Anggaran, Persepsi Keadilan Distributif, Keadilan Prosedural, Dan *Goal Commitment* Terhadap Kinerja Dinas. Vol. 9. *Jurnal*. hal 99.
- Umar, Husein. 2005. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- _____. Lima Kepala SKPD Terancam Digeser. *Metropolis*. Melalui [www.padangekspres.co.id]. Sabtu, 21/05/2011 12:46 WIB